

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

I I.1. Laba dan Informasi Laba

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Laba sendiri merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan biaya dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan laba tidak dapat dipisahkan dari kinerja manajemen. Laba dijadikan salah satu ukuran keberhasilan manajemen dalam menjalankan aktivitas dalam perusahaan karena semua aktivitas manajemen akan berimbas pada laba yang diterima oleh perusahaan tersebut.

Chariri dan Ghozali (2003) menyatakan bahwa laba merupakan selisih lebih pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Selain sebagai ukuran kinerja manajemen, laba juga dijadikan sebagai insentif bagi investor untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Bagi investor, informasi mengenai laba akan sangat penting bagi keputusan investasi yang akan diambil. Hal ini berkaitan dengan jumlah pengembalian yang akan diperoleh kembali berupa dividen yang diberikan perusahaan kepada investor dari sejumlah investasi yang dilakukan.

Kebutuhan informasi akan laba juga diperlukan oleh kreditor untuk melakukan penilaian akan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang dilakukan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan hal yang penting bagi kreditor

karena kreditor memerlukan jaminan akan pinjaman terhadap perusahaan. Informasi akan laba perusahaan merupakan bentuk jaminan akan pinjaman dan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman kepada kreditor.

I 1.2. Teori Keagenan

Dalam perusahaan terdapat hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan agen. Menurut teori keagenan terdapat hubungan antara pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Prinsipal adalah pihak yang mensuplai modal. Sedangkan, agen adalah pihak yang mensuplai tenaga kerja (Watts dan Zimmerman, 1978). Prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk melaksanakan proses bisnis atas nama prinsipal, dan agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan. Bentuk tanggung jawab ini direalisasikan dalam kembalian yang akan diperoleh prinsipal, misalnya dalam bentuk laba dan dividen.

Namun dalam kenyataannya, eksistensi dari hubungan ini menyebabkan setiap individu termotivasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi awal mula konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal berusaha mendapatkan keuntungan sebesar dan secepat mungkin bagi dirinya sendiri atas investasi yang dikucurkan bagi perusahaan per bagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Prinsipal kemudian menilai prestasi agen berdasarkan kembalian yang diberikan. Semakin besar dividen yang dihasilkan, maka akan muncul anggapan semakin berhasil pula manajemen.

Sementara manajemen sebagai pihak agen ingin mendapatkan penghargaan dari prinsipal sebesar mungkin atas kinerjanya mengelola perusahaan.

Namun prinsipal tidak memiliki informasi yang seimbang akan kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan sebanyak yang dimiliki oleh agen. Karena agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi tersebut. Sehingga terjadilah ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen yang sering disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*). Terjadinya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini dapat menimbulkan dua permasalahan: (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Sari (2012)

- a. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Sehingga pada akhirnya prinsipal harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan baik. Prinsipal akan memberi imbalan kepada agen untuk menjamin agen tidak mengambil tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi prinsipal yang biasa disebut *agency cost*. (Sanjaya 2008). *Agency costs* ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian

internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk '*bonding expeditures*' yang diberikan kepada manajemen dengan pemegang saham (Daniri, 2004).

I 1.3. *Good Corporate Governance*

Konsep pengelolaan perusahaan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan suatu prinsip *good corporate governance*. Prinsip pengelolaan ini didasarkan berbagai tuntutan bukan hanya dari *shareholder*, namun juga dari berbagai *stakeholder* yang berhubungan dengan perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan dihadapkan bukan hanya laba yang dianggap sebagai ukuran kinerja perusahaan, namun ada prinsip *good corporate governance*.

Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Konsep ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang dapat memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima kembalian atas dana yang telah mereka investasikan. Selain itu, dengan adanya *corporate governance* diharapkan dapat menekan praktik-praktik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen dan menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan *good corporate governance*. Dalam Cadbury Comitee (1992) disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Di negara tetangga, menurut *Finance Committee on Corporate Governance*, Malaysia: GCG diartikan sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sementara di Indonesia sendiri GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2004).

Dalam Daniri 2004, secara umum ada lima prinsip dasar yang dikandung dalam GCG, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

II.4. Komite Audit

II.4.1. Pengertian Komite Audit

Terdapat dua sistem dalam pengelolaan internal sebuah organisasi, yaitu sistem *single board* dan *dual board*. Indonesia menganut sistem *dual board* dalam struktur organisasi internalnya. Terdapat dua fungsi terpisah dalam sistem ini, yaitu fungsi pengambilan kebijakan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dapat membentuk suatu

komite audit untuk membantu menjalankan fungsi mereka. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat meminta kalangan luar, dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, menjadi anggota komite audit guna mencapai tujuan dari komite audit tersebut. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, auditor eksternal, sehingga, komite audit hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Wardhani dan Joseph, 2010).

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yaitu:

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

II.4.2. Prinsip-prinsip Komite Audit

Dengan adanya komite audit, diharapkan penerapan *good corporate governance* dapat berjalan dengan baik. Baik dari segi prinsip hingga ke penerapan di dalam perusahaan itu sendiri. Dari beberapa prinsip *good corporate governance*, fokus utama terletak pada prinsip independensi. Prinsip ini diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Independensi ini ditegaskan dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24

September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diringkas sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten.
5. Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain

Selain itu, melalui keputusan tersebut BAPEPAM juga mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 3 anggota, dimana minimal satu orang merupakan anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. BAPEPAM juga menghimbau bahwa setidaknya-tidaknya komite audit melakukan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan.

II.4.3. Peran Komite Audit

Dengan adanya keputusan Bapepam, keberadaan komite audit dalam suatu korporasi menjadi sebuah keharusan. Pentingnya peran komite audit menunjang performa pelaporan keuangan suatu perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

II.4.4. Tujuan dan Manfaat Pembentukan Komite Audit

Ada beberapa tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit. Menurut Effendi (2002) dalam Putri (2011) disebutkan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif adalah:

1. Pelaporan Keuangan

Direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

2. Manajemen Risiko dan Kontrol

Direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3. *Corporate Governance*

Direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit tertuang dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-41/PM/2003 yang menyebutkan bahwa komite audit memiliki tugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

II.5. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan sebuah teori yang sering dikaitkan dengan manajemen laba dikarenakan teori ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi manajemen dalam mengambil keputusan serta menanggapi maksud standar akuntansi terbaru.

Menurut teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1978), perusahaan harus diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari alternatif prosedur untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimumkan nilai perusahaan. Ada kebebasan tersendiri yang diberikan

kepada manajemen untuk dapat memilih metode akuntansi yang diperbolehkan standar akuntansi selama tidak menyimpang dari standar. Manajer dapat memilih kebijakan akuntansi sesuai dengan kepentingan mereka, namun mungkin tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Hal ini dikarenakan manajer diasumsikan sebagai suatu pihak yang berpikir rasional.

II.6. *Earnings Management*

II.6.1. *Pengertian Earnings Management*

Beberapa skandal keuangan terakhir berhubungan dengan kinerja manajemen dalam perusahaan. Salah satu penyebab dari skandal yang terjadi adalah manajemen laba. Meskipun tidak menyalahi prinsip akuntansi yang berterima umum, namun manajemen laba dinilai dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang melakukan praktik tersebut. Banyak pihak menyalahkan manajemen ketika melakukan manajemen laba karena berimbas kepada kualitas laporan keuangan yang nantinya pada tahapan yang lebih lanjut dapat menyebabkan kesalahan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.

Menurut Healy dan Whalen (1998) dalam Stanhope (2004) menyatakan bahwa:

“Earnings Management occurs when managers use judgement in financial reporting and in structuring transactions to after financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”

Sementara menurut Sugiri (1998) dalam Pertiwi (2010), manajemen laba dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Definisi Sempit

Earnings Management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. *Earnings Management* dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.

2. Definisi Luas

Earnings Management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan sesuai dengan kepentingan manajemen tanpa melanggar prinsip dan metode akuntansi yang berterima umum, yang dapat menyesatkan persepsi pengguna laporan keuangan akan kinerja ekonomi perusahaan tanpa mempengaruhi profitabilitas ekonomis jangka panjang dari perusahaan tersebut.

II.6.2. Motivasi *Earnings Management*

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui teori akuntansi positif. Menurut Scott (2000) ada beberapa hal yang mendasari manajemen dalam melakukan manajemen laba:

1. *Bonus Plan hypothesis*

Bonus Plan hypothesis menegaskan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung untuk memilih metode akuntansi yang membuat laba yang dilaporkan pada periode berjalan menjadi lebih tinggi.

2. *Debt (equity) hypothesis*

Debt (equity) hypothesis menegaskan bahwa perusahaan dengan rasio *debt to equity* lebih besar, cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menaikkan labanya. Dalam konteks perjanjian utang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban utang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda hingga tahun berikutnya.

3. *Political cost hypothesis*

Political cost hypothesis menegaskan bahwa dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan yang lebih besar cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat menurunkan laba bersih yang dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, misalnya dalam hal pajak yang ditarik oleh pemerintah, besarnya sesuai dengan prosentase laba yang diperoleh perusahaan tersebut.

Selain beberapa motivasi tersebut, ada beberapa motivasi lain yang dapat mendasari perilaku manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Dalam Sanjaya (2008) disebutkan juga motivasi lain seperti motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, dan motivasi pasar modal.

II.6.3. Pola *Earnings Management*

Menurut Scott (2000) ada beberapa pola yang biasa dilakukan oleh manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Beberapa diantara adalah:

1. *Taking a bath*

Ketika perusahaan ingin melaporkan laba yang tinggi, maka perusahaan akan melakukan penghapusan beberapa aktiva dan pengakuan biaya periode mendatang ke periode berjalan sebagai kerugian di periode tersebut dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat.

Pola ini dipilih oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan proses reorganisasi atau pada saat pengangkatan *Chief Executive Officer* (CEO) yang baru dengan cara melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Ketika laba normal dilaporkan pada tahun berikutnya, ada harapan kenaikan jumlah laba yang diperoleh perusahaan akan membuat investor percaya bahwa kinerja perusahaan akan lebih baik dari tahun ke tahun.

2. *Income Minimization*

Income minimization adalah tindakan manajemen untuk menurunkan laba yang dilaporkan. Hampir sama dengan pola *taking a bath*, namun pola ini dilakukan dengan alasan politis. Pola ini dilakukan dengan cara menghapus barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, biaya riset dan pengembangan dipercepat. Tujuan dari penurunan laba ini bermaksud agar tidak mendapat perhatian publik.

3. *Income Maximization*

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan laba dan jumlah yang lebih besar dengan harapan bahwa manajemen akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Keinginan perusahaan untuk menaikkan bonus ini membuat manajemen menaikkan laba sehingga dapat meningkatkan bonus yang diterima oleh manajemen. Tindakan ini biasa dilakukan pada saat laba perusahaan mengalami penurunan. Selain *bonus purposive*, ada kemungkinan juga tindakan ini dilakukan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang.

4. *Income smoothing*

Tindakan *income smoothing* dilakukan dengan cara meratakan laba agar laba yang dilaporkan oleh perusahaan seolah-olah stabil dan berfluktuasi rendah. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa investor cenderung menyukai laba perusahaan yang relatif stabil.

II.7. *Real Earnings Management*

Selain melakukan *accrual earnings management*, manajemen dapat juga melakukan *real earnings management* atau dikenal dengan istilah manajemen laba riil. Roychowdhury (2006) mendefinisikan manajemen laba riil sebagai perbedaan praktek operasi yang dilakukan oleh manajemen dari praktek operasional normal yang dipicu oleh keinginan manajer untuk memberikan pemahaman yang keliru kepada stakeholder agar stakeholder percaya bahwa tujuan pelaporan keuangan tertentu telah tercapai sesuai praktek operasi normal perusahaan. Tindakan ini mungkin tidak selalu memberikan kontribusi terhadap

nilai perusahaan meskipun manajemen melakukannya untuk mencapai tujuan dari pelaporan. Namun jika perusahaan terlibat dalam kegiatan yang lebih luas dari aktivitas normal yang biasa dilakukan, dengan tujuan memperoleh target laba, maka tindakan tersebut dapat disebut dengan manajemen laba riil.

II.7.1. Metode *Real Earnings Management*

Dalam Roychowdhury (2006) dijelaskan bahwa manajemen laba riil dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Manipulasi penjualan

Didefinisikan sebagai usaha manajemen untuk meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak, seperti menawarkan tingkat bunga kredit lebih rendah (*zero-percent financing*). Strategi ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba periode berjalan, selain itu juga dapat menyebabkan arus kas yang masuk dapat meningkat secara signifikan.

2. Mengurangi beban-beban diskresioner

Perusahaan dapat menurunkan *discretionary expenditures* seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, administrasi, dan umum. Contoh dari praktik manajemen laba riil ini adalah dengan pengurangan beban diskresioner dalam bentuk kas, maka pengurangan beban diskresioner akan memperkecil arus kas keluar. Strategi ini akan meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini, namun tindakan ini berisiko dapat menurunkan arus kas periode mendatang.

3. *Overproduction*

Metode ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan laba. Perusahaan meningkatkan level produksi lebih banyak daripada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi dapat menyebabkan biaya tetap (*fixed cost*) per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan *Cost of Goods Sold* (COGS) dan menyebabkan margin operasi menjadi lebih tinggi.

II.8. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Beberapa studi terdahulu telah meneliti mengenai hubungan karakteristik personal komite audit terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sun et al. (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh gender ketua komite audit terhadap Manajemen Laba di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Cina. Dalam penelitian tersebut hanya mengambil gender ketua komite audit sebagai variabel independennya. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan negatif antara gender ketua komite audit suatu perusahaan terhadap manajemen laba yang dilakukan suatu perusahaan.
2. Qi dan Tian (2012) menemukan hubungan negatif antara karakteristik personal komite audit dengan manajemen laba di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Cina. Penelitian ini mengambil beberapa hal sebagai proksi, seperti umur, gender, perbedaan tingkat pendidikan, serta

pengalaman bekerja komite audit. Dalam penelitian tersebut melihat karakteristik personal komite audit secara umum. Variabel dependen yang diambil adalah manajemen laba akrual (*accrual earnings management*). Dalam penelitian tersebut, Qi dan Tian mengatakan bahwa ketertarikan untuk meneliti adalah disebabkan Cina merupakan sebuah negara dengan perekonomian sosialis dan tengah mengalami kemajuan dalam pasar modal.

3. Sementara di Indonesia sendiri sudah ada penelitian sejenis mengenai karakteristik personal komite audit terhadap manajemen laba. Wardhani dan Joseph, 2010 tidak menemukan hubungan yang signifikan antara karakteristik komite audit dengan manajemen laba. Di dalam penelitian Wardhani dan Joseph, variabel yang diambil adalah umur, latar belakang akuntansi dan keuangan, pengalaman bekerja sebagai partner di Kantor Akuntan Publik (KAP), pernah atau sedang bekerja dan mempunyai jabatan penting di perusahaan yang diketuai komite auditnya, serta variabel tingkat pendidikan ketua komite audit perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Wardhani dan Joseph mengambil objek penelitian seorang ketua komite audit karena dianggap mewakili komite audit di dalam suatu perusahaan. Variabel dependen yang diteliti adalah manajemen laba akrual dengan akrual diskresioner sebagai proksinya.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, lebih terkonsentrasi pada pengaruh karakteristik personal komite audit terhadap manajemen laba, sementara masih belum ada peneliti yang mengkaji pengaruh

antara karakteristik personal komite audit terhadap manajemen laba riil yang dilakukan oleh manajemen.

Di dalam perusahaan, tindakan manajemen laba riil dimungkinkan untuk terjadi karena manajemen laba riil merupakan tindakan yang sangat dekat dengan manajemen. Tingkat keterjadian suatu manajemen laba riil dalam suatu perusahaan adalah sangat besar, namun seberapa jeli komite audit dalam melihat kejadian ini merupakan suatu hal yang patut untuk diperhatikan.

Umur dari anggota komite audit dapat menjadi proksi yang mengindikasikan pengalaman dan resistensinya terhadap pengambilan risiko dan perubahan. Ada anggapan bahwa anggota komite audit yang lebih tua memiliki kemampuan fisik dan stamina yang kurang serta ide yang kurang segar dibandingkan dengan anggota komite audit yang lebih muda. Namun anggota komite audit yang lebih tua akan lebih konservatif dalam memilih auditor eksternal, dan lebih preventif terhadap kolusi antara auditor eksternal dan manajer, selain itu pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan auditor muda (Qi dan Tian, 2012). Semakin tinggi usia anggota komite audit menunjukkan semakin banyak pengalaman yang dipunyai khususnya sebagai seorang *top management*. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah

H₁: Umur anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *real earnings management*

Heminway (2007) berargumen bahwa wanita lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan pria yang lebih banyak kemungkinan untuk melakukan

manipulasi dalam perusahaan. Anggota komite audit wanita lebih konservatif dan memiliki tingkat etika yang lebih tinggi dibandingkan dengan komite audit pria. Erhardt et al. (2003) dalam Qi dan Tian (2012) menemukan bahwa perbedaan gender pemimpin dapat berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Mereka beralasan bahwa perbedaan gender dapat menyebabkan perbedaan pandangan, yang mana dapat memicu keunggulan antara satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Dari penjelasan tersebut, hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Proporsi anggota komite audit wanita berpengaruh negatif terhadap *real earnings management*

Wirsema dan Bantel (1992) dalam Qi dan Tian (2012) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dapat merefleksikan kemampuan dan keterampilan seseorang. Eksekutif dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan kemampuan kognitif mereka yang lebih baik untuk memproses dan menganalisis informasi, serta kemampuan menganalisis permasalahan dalam perusahaan. Peneliti beranggapan bahwa tingkat pendidikan anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen riil dalam sebuah perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat pendidikan anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *real earnings management*